DAFTAR ISI

COVER i
PERNYATAAN KEASLIAN DISERTASI ii
LEMBAR PERSETUJUAN iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN iv
ABSTRACT v
ABSTRAK vi
RINGKASAN EKSEKUTIF vii
EXECUTIVE SUMMARY ix
DAFTAR SINGKATAN xi
KATA PENGANTAR xiv
DAFTAR ISI xvii
DAFTAR TABEL xxi
DAFTAR GAMBAR xxii
DAFTAR LAMPIRAN xxiii
BAB I. 1
PENDAHULUAN 1
1.1. Latar Belakang 1
1.2. Rumusan Masalah dan Pertanyaan Penelitian 12
1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian 12
1.4. Orisinalitas Penelitian 13
BAB II. 15
AKUNTANSI AKRUAL PEMERINTAHAN: PEMICU, SEJARAH, IMPLEMENTASI, DAN LENSA TEORI 15
2.1 NPM Sebagai Pemicu Perubahan Manajemen Sektor Publik 15
2.1.1. NPM dalam Konteks Internasional 16
2.1.2. NPM dalam Konteks Indonesia 18
2.2 Akuntansi Akrual dalam Konteks Entitas Pemerintahan 21
2.2.1 Akuntansi Akrual dalam Konteks Internasional 21
2.2.2 Akuntansi Akrual dalam Konteks Pemerintah Indonesia 23

2.3 Inovasi Akuntansi Sektor Publik 28
2.3.1 Motivasi Penerapan Akuntansi Akrual di Entitas Pemerintahan 28
2.3.2 Kesuksesan Implementasi Akuntansi Akrual di Pemerintahan 30
2.3.3 Kegagalan Implementasi Akuntansi Akrual di Pemerintahan 31
2.3.4 Pemanfaatan Informasi Akuntansi Akrual di Pemerintahan 35
2.4. Model Reformasi Manajemen Keuangan Pemerintahan 37
2.4.1. Perjalanan Model FMR Luder 40
2.4.2. Model FMR Luder Sebagai Lensa Teori 43
2.4.3. Keterbatasan FMR Luder 45
2.5. Negotiated Order Theory (NOT) 46
BAB III. 48
METODE PENELITIAN 48
3.1. Paradigma Penelitian 48
3.2. Desain Penelitian 62
3.2.1. Penentuan Kasus 63
3.2.2. Pengumpulan dan Analisis Data 64
3.2.2.1. Wawancara Mendalam 64
3.2.2.2. Dokumentasi 73
3.2.2.3. Analisis Data 73
BAB IV 77
PENGEMBANGAN KATEGORI TERBUKA DAN KATEGORI INTI 77
4.1. Pendahuluan 77
4.2. Kategori Terbuka 77
4.3. Kategori Inti 78
4.4. Penjelasan makna Kategori Inti dan Kategori Terbuka 80
4.4.1. Pemicu Implementasi Akrual 80
4.4.1.1. Doktrin Akuntansi Bisnis 80
4.4.2. Proses Pemahaman 83
4.4.2.1. Pelatihan & Bimbingan Teknis 83
4.4.2.2. Diskusi Akrual 84

4.4.3. Makna Akrual 85
4.4.3.1. Saat Pengakuan 86
4.4.3.2. Sesuai Pekerjaanya 87
4.4.3.3. Mengikuti Kemajuan 88
4.4.4. Konsekuensi Teknis Pelaporan 89
4.4.4.1. Permasalahan Aset Tetap 90
4.4.4.2. Perubahan Kebijakan Akuntansi 91
4.4.4.3. Rekonsiliasi Akun Sering Terjadi 92
4.4.5. Kendala Teknis Implementasi Akuntansi Akrual 93
4.4.5.1. SDM Akuntansi 93
4.4.5.2. Integrasi Sistem Informasi 94
4.4.5.3. Ketidakpahaman Bidang Anggaran 95
4.4.5.4. Ketergantungan Orang Kunci 95
4.4.6. Aspek Pendukung 96
4.4.6.1. Komitmen Pimpinan 97
4.4.6.2. Pemenuhan Aturan 98
4.4.6.3. Kekuatan Opini WTP 99
4.4.6.4. Tekanan Masyarakat 99
4.4.7. Aspek Penghambat 100
4.4.7.1. Ego Sektoral 101
4.4.7.2. Kelembaman 102
4.4.8. Pola Negosiasi 102
4.4.8.1. Diskusi 103
4.4.8.2. Peraturan 103
4.4.8.3. Ketegasan Pimpinan 104
4.4.9. *Outcomes* Reformasi 105
4.4.9.1. Pengamanan Aset 105
4.4.9.2. Pengendalian 106
4.4.9.3. Proyeksi 108
4.4.9.4. Memunculkan Kreativitas 109

4.4.9.5. Kepercayaan Publik 110
BAB V 111
MODEL REFORMASI AKUNTANSI AKRUAL DALAM BINGKAI FMR LUDER DAN *NEGOTIATED ORDER THEORY* 111
5.1. Pendahuluan 111
5.2. Model Reformasi Akuntansi Akrual di Pemerintah Kota Semarang ... 111
5.3. Pola Negosiasi dalam Bingkai Negotiated Order Theory 119
BAB VI 122
SIMPULAN, KONTRIBUSI, KETERBATASAN, DAN REKOMENDASI ... 122
6.1. Simpulan 122
6.2. Kontribusi 125
6.2.1. Kontribusi Teori 125
6.2.2. Kontribusi Metode Penelitian 125
6.2.3. Kontribusi Praktik 126
6.3. Keterbatasan 126
6.4. Rekomendasi 127
Daftar Pustaka 129
Lampiran 140